

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran akan pentingnya mutu pendidikan bagi masyarakat Indonesia semakin dirasakan dan diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan rendahnya mutu pendidikan nasional dewasa ini yang dapat segera diperbaiki. Berdasarkan laporan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berkedudukan di Hongkong¹, diungkapkan bahwa Sistem Pendidikan Indonesia adalah yang terburuk di Asia. Mutu pendidikan masih di bawah Negara Vietnam, dan Negara-negara tetangga di Asia. Pendidikan nasional di Indonesia hanya mendapat tingkat 12 di bawah Vietnam, sedangkan rangking pertama adalah Korea Selatan.

Melihat fakta di atas, mutu pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk diusahakan terpenuhi. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai hal, secara makro dipengaruhi oleh faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi dan komunikasi dalam pendidikan serta sumber daya manusia.² Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mutu pendidikan merupakan hal sangat tergantung kepada tiap-tiap unsur dari komponen-komponen yang disebutkan di atas.

Pendidikan sebagai suatu usaha dalam mempersiapkan generasi yang lebih baik yang dapat berperan dalam kehidupan beragama, bernegara dan berbangsa. Peranan pendidikan yang cukup berat tersebut berimplikasi kepada tuntutan pendidikan yang bermutu dan membentuk karakteristik bangsa yang intelek, maju dalam segala bidang, membentuk perilaku, etika dan moral yang baik sehingga dapat menjadi bekal dalam menghadapi era globalisasi.

Ahmad Tafsir³ mendefinisikan pendidikan sebagai usaha meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Menurut pendapat tersebut, pendidikan seharusnya dapat meningkatkan segala aspek dan potensi peserta didik melalui proses

¹ Sebagaimana dimuat dalam The Jakarta Post (Vol.19, No. 127:2001)

² Hadis, A. dan Nurhayati. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta (2010),3

³ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4

pendidikan yang efektif yang prosesnya berlangsung secara operasional dalam pembelajaran.

Proses pendidikan yang berlangsung secara operasional dilakukan pada lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam pendidikan formal proses pembelajaran berlangsung pada satuan pendidikan tertentu dan harus mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari delapan standar, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa : “Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan bagi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Proses dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sadar dan sistematis oleh pendidik dan peserta didik, pemerintah, dan masyarakat luas.⁴

Dalam UUSPN telah dirumuskan juga bahwa pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Adapun tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁶

⁴ Syaeful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 20

⁵ Agus Irianto, *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 3

⁶ Nurudin dkk, *Ujian nasional di Madrasah Persepsi dan aspirasi Masyarakat*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 1

Tujuan pendidikan tergantung kepada orang (ahli) mendefinisikan pendidikan itu sendiri. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan adalah untuk memanusiaakan manusia, maka tujuan pendidikan ialah meningkatkan derajat kemanusiaan manusia. Karena manusia yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi itulah yang dapat disebut manusia.⁷

Dalam rumusan tujuan tersebut mengandung makna yang sangat dalam dan luas yang terkait dengan sumber daya manusia, sehingga perlu penangan yang serius, cermat, komprehensif, strategis dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan anggaran yang tidak sedikit, perencanaan yang matang, serta pertanggungjawaban yang transparan.

Tujuan pendidikan di atas tentu harus dapat dilaksanakan oleh semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia termasuk madrasah. Madrasah dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 merupakan lembaga pendidikan formal yang berada dalam binaan Kementerian Agama. Lembaga formal tersebut, yaitu Raudhatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

MTs sebagai lembaga pendidikan formal disebutkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

MTs sebagai satu lembaga pendidikan menengah umum menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 pasal 76 berfungsi :

- a. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
- b. Meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

⁷ Tafsir, : *Filsafat Pendidikan Islam*, 46.

- c. Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. Menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. Meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- g. Tujuan pendidikan di mts dalam pp nomor 17 tahun 2010 pasal 77, yaitu membentuk insan yang:
 - h. Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
 - i. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
 - j. Sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
 - k. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan di madrasah pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan madrasah merupakan kegiatan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan (RA, MI, MTs dan MA) agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan di madrasah sama dengan tujuan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan di MTs sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL dalam perspektif kurikulum 2013 merupakan tujuan institusional atau kelembagaan. Secara hirarkis tujuan pendidikan dalam kurikulum 2013 terdiri dari Tujuan Pendidikan Nasional, Tujuan Institusional (jenjang), Tujuan Tingkat dalam jenjang, Tujuan Mata Pelajaran dan Tujuan Pembelajaran.

Tujuan Institusional (jenjang), adalah tujuan yang dimiliki oleh jenjang tertentu yang berbeda dengan jenjang lainnya, yaitu jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan juga SMA/MA, artinya SKL untuk tiap jenjang tersebut berbeda

sesuai dengan jenjangnya. Tujuan tingkat dalam jenjang, yaitu tujuan pendidikan yang berlaku untuk setiap tingkat (kelas) dalam satu jenjang. Tujuan tingkat ini dikenal dengan istilah Kompetensi Inti (KI). KI untuk setiap tingkat/kelas tertentu berbeda dengan kelas/tingkat lainnya. Tujuan Mata Pelajaran dalam kurikulum 2013 bentuknya adalah Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran adalah indikator yang dibuat oleh guru sebagai penjabaran dari KD.

SKL untuk MTs sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2013 terdiri dari dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. SKL sikap, pengetahuan dan keterampilan bagi MTs, yaitu:

1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak, jujur, dan peduli, bertanggungjawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
2. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri.

Penyelenggaraan pendidikan di MTs diharapkan dapat sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jika proses pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka pendidikan tersebut menjadi pendidikan bermutu. Nana Saudih Sukmadinata memberikan gambaran, bahwa permasalahan mutu pendidikan disebabkan oleh : (1) Mutu lulusan, (2) mutu pengajaran, (3) bimbingan dan latihan dari guru, (4) mutu profesionalisme dan kinerja guru, (5) mutu manajerial pimpinan pendidikan, (6) keterbatasan sarana prasarana pendidikan, (7) kurangnya fasilitas pendidikan, (8) keterbatasan media dan sumber belajar, (9) Keterbatasan alat dan bahan latihan, (10) iklim sekolah, (11) lingkungan pendidikan, (12) dukungan dari pihak terkait dengan pendidikan.

Semuanya berujung pada mutu lulusan apakah mutunya tinggi atau rendah tergantung kepada ke 12 point di atas.⁸

Namun untuk mencapai madrasah yang bermutu sebagaimana di atas banyak tantangan yang dihadapinya, salah satunya adalah tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi sangat besar pengaruhnya dalam berbagai bidang kehidupan tak terkecuali bidang pendidikan. Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, maka dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia bermutu tinggi, berwawasan luas, memiliki keunggulan kompetitif, dan terampil mengelola hidup.

Tuntutan globalisasi yang sangat kuat menuntut pada ranah pendidikan yang sangat kompetitif. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Hal ini dikarenakan adanya (1) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) persaingan global yang semakin ketat, dan (3) kesadaran masyarakat (orang tua siswa), masyarakat dan dunia usaha menghendaki suatu pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu semakin tinggi. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi akhir-akhir ini telah membawa dampak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga permasalahan dapat dipecahkan dengan mengupayakan penguasaan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, berkaitan erat dengan pembaharuan sistem manajemen pendidikan nasional. Sebagai implikasi dari pembaharuan sistem manajemen pendidikan nasional menuntut pembina dan penyelenggara pendidikan merubah paradigma dan tata kelola pendidikan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Setelah pemberlakuan otonomi daerah dan menguatnya otonomi pendidikan sebagai salah satu bidang yang diotonomkan kepada pemerintahan daerah

⁸ Nana Saudih Sukmadinata , *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip dan Instrumen)*.Bandung : Rafika Aditama, 2008), 8

menjadikan kewajiban pemerintah daerah dalam pemberdayaan satuan pendidikan serta kewajiban satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sedangkan pada ayat 3 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang diharapkan oleh *stakeholders*, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan SPMP dalam pengelolaan pendidikan bermutu yang berorientasi pada *stakeholders* yang dilaksanakan secara sistematis, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan mutu yang tinggi.⁹ Dengan demikian SPMP menjadi sarana untuk meningkatkan mutu madrasah.

Dalam implementasinya SPMP dikerjakan oleh tim pengembang madrasah yang terdiri dari kepala madrasah dan para guru termasuk tenaga kependidikan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap mutu pendidikan. Untuk alasan di atas, cakupan sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang mendukung pekerjaan mereka. Untuk itu, hendaknya dunia pendidikan menerapkan SPMP sebagai penjaminan mutu di lembaganya agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Penjaminan mutu dimaksud adalah seluruh rencana dan tindakan yang sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari mutu.¹⁰ Penjaminan dan peningkatan mutu

⁹ Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education*. London : Kogan Page. 1993, 13

¹⁰ http://file.upi.edu/direktori/fpmipa/jur._pend._fisika/196204061989031. Diunduh tanggal 16 Februari pukul 10.02

pendidikan pada level pendidikan tingkat dasar dan menengah terkait dengan pengkajian mutu pendidikan, analisis dan pelaporan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan penumbuhan budaya mutu berkelanjutan.

Konsep penjaminan mutu menurut Elliot dalam Arifin adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan kualitas biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen.¹¹

Sementara itu, Gryna sebagaimana dikutip Ryan Matulatan¹² menjelaskan bahwa, penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti untuk membangun kepercayaan bahwa mutu dapat berfungsi secara efektif. Senada dengan itu, Cartin mendefinisikan penjaminan mutu sebagai berikut : *Quality Assurance is all planned and systematic activities implemented within the the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a product or service will fulfill requirements for quality*¹³. Maksudnya bahwa penjaminan mutu adalah semua kegiatan yang direncanakan secara sistematis yang diimplementasikan dalam sistem penjaminan mutu untuk memberikan keyakinan bahwa produk atau jasa yang akan memenuhi persyaratan dan berkualitas.

Para pengelola pendidikan pada saat ini dihadapkan kepada harapan masyarakat yang begitu tinggi terhadap mutu pendidikan. Berbagai tanggapan muncul dari berbagai kalangan mulai dari pemerhati pendidikan, birokrat, orang tua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun dari pelaku pendidikan itu sendiri. Tuntutan terhadap mutu pendidikan semakin gencar karena lembaga pendidikan dianggap tidak mampu menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas. Hal ini sangat dirasakan oleh berbagai kalangan yang berkiprah dalam dunia pendidikan. Ada yang beranggapan bahwa rendahnya mutu pendidikan sebagai

¹¹ Arifin, *Analisis implementasi-kebijakan-empat-pilar-pengembangan-universitas-negeri-gorontalo*, Gorontalo: Pustikom, UNG Gorontalo, 2012, 12

¹² <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/teknik-sipil/article/view/1206>, diunduh tanggal 16 Februari pukul 04.15.

¹³ Arifin, *Analisis implementasi-kebijakan-empat-pilar*, Gorontalo: 2002, 35

akibat dari krisis multidimensi, rendahnya partisipasi masyarakat, profesionalisme guru menurun, kepemimpinan pendidikan yang rapuh, bahkan karena kemauan politik pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tidak menjadi prioritas pembangunan.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) pendidikan di lembaga pendidikan khususnya di madrasah sedang berusaha untuk mencapai standar yang diharapkan. Karena madrasah masih terasa ketinggalan, terutama sumber daya pendidik dan tenaga kependidikannya yang belum profesional karena masih banyak tenaga pendidik yang *miss match* yang perlu distandarkan. Demikian juga tidak bisa dipungkiri jumlah madrasah didominasi oleh madrasah swasta hampir 90% yang dikelola oleh yayasan pendidikan baik pribadi atau kelompok organisasi dengan biaya mandiri dan swadaya walaupun ada bantuan pemerintah melalui BOS dan BOSDA juga ada, sehingga madrasah dianggap belum berkualitas.¹⁴

Untuk mengetahui standarisasi madrasah pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan. Sebagaimana disebutkan pada Bab I Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat Sisdiknas bahwa : “SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP. nomor 32 tahun 2013 dan PP. Nomor 13 tahun 2015 yang menepatkan standarisasi pendidikan melalui delapan SNP yaitu; Standar kompetensi lulusan, Standar isi, Standar proses, Standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan dan Standar penilaian pendidikan.

Kemudian untuk implementasi dari pencapain SNP kementerian pendidikan dan kebudayaan, pertama mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPMP sekaligus dengan petunjuk pelaksanaan dan

¹⁴Depag RI, *Program Inservice Training KKG-MGMP-KK BP3*, (Jakarta : Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 1.

petunjuk teknisnya. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM.

Tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan tersebut, perlu direspon secara kreatif dan proaktif, dengan melakukan berbagai upaya perbaikan mutu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian pada madrasah yang dapat mempertahankan prestasinya bahkan dapat meningkatkan mutu secara terus-menerus, sehingga dapat dijadikan acuan bagi madrasah yang berprestasi dan madrasah yang mutunya masih rendah salah satunya madrasah tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs.

MTs adalah institusi pendidikan formal yang penyelenggaraannya ada di bawah binaan Kementerian Agama. Sebagai organisasi, madrasah seharusnya memiliki visi untuk mensejajarkan dirinya sebagai institusi yang mempunyai budaya mutu, karena secara legal formal madrasah merupakan lembaga yang sudah sejajar dengan sekolah yang di dalamnya tuntutan mutu dalam berbagai institusi madrasah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didalami.

MTs diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang siap dan mampu berkompetisi dengan situasi lokal maupun global yaitu melalui pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan mempunyai peran yang sangat penting sebagai agen dalam perubahan sosial (*agent of social change*). Melalui pendidikan akan diperoleh konservasi nilai-nilai dan kultur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dengan peran dan sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, MTs sebagai suatu organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.

Keberhasilan MTs adalah keberhasilan kepalanya. Kepala MTs yang berhasil adalah apabila ia mampu memahami keberadaan MTs sebagai organisasi yang kompleks dan unik serta mampu melaksanakan peranan kepala sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpinya. Sehingga kepala memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemajuan dan keberhasilan MTs.

Namun demikian mutu MTs dipertanyakan bahkan kecenderungan masyarakat (orang tua siswa) menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum.

MTs menjadi alternatif kedua dan bukan menjadi primadona pilihan orang tua siswa padahal di MTs siswa mendapat ilmu pengetahuan umum sebagai daya saingnya serta mendapat ilmu agama sebagai nilai jualnya sekaligus secara bersamaan.

Nampaknya persoalan MTs merupakan persoalan esensial dan substansial yang harus segera mendapatkan perhatian yang serius, sebab tingginya kualitas suatu lembaga pendidikan termasuk MTs merupakan prasyarat utama bagi timbulnya minat masyarakat terhadap madrasah sehingga pada gilirannya masyarakat akan menjadikan MTs sebagai pilihan pertama bagi anak-anak mereka bersekolah dengan harapan akan mendapatkan pengetahuan agama sebagai daya tarik utama dan pengetahuan umum sebagai daya saing terhadap sekolah-sekolah umum lainnya. Melalui pendidikan madrasah diharapkan agar mereka memiliki dua kemampuan sekaligus, yaitu tidak hanya memiliki pengetahuan umum (IPTEK) saja tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap agamanya (IMTAQ).

MTs sebagai sebuah lembaga pendidikan tentunya memiliki visi dan misi yang sangat terukur dan terarah. MTs di Kabupeten Bandung Barat memiliki misi yang relevan dengan arah dan tujuan pendidikan, seperti misalnya : "terwujudnya alumni yang unggul dalam ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa". Artinya alumni madrasah dapat mewarnai di lingkungannya masing-masing dan lingkungan yang lebih luas serta berharap menjadi insan yang terbaik. Sebagaimana dijelaskan al-Qur'an surah Ali Imran, 3:110:

Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.



Memperhatikan perkembangan madrasah di Kabupaten Bandung Barat sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berlangsung di mesjid, surau maupun pesantren sebagai lembaga pendidikan informal. Oleh sebab itu madrasah boleh dikatakan sebagai perkembangan lebih lanjut sekaligus merupakan awal kebangkitan lembaga pendidikan Islam secara formal.¹⁵ Begitu pula dengan lembaga pendidikan Islam, pesantren, baik karena pesantren merupakan cikal bakal berdirinya madrasah itu sendiri ataupun karena pesantren juga menyelenggarakan pendidikan dan madrasah di dalamnya,¹⁶ atau juga karena misi yang sama sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada belajar keagamaan.

Dalam perkembangannya, MTs sebagai lembaga pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung Barat juga mengalami pasang surut dalam perkembangan misinya dalam membangun kebudayaan dan peradaban masa depan.¹⁷ Satu sisi ada MTs yang maju dan makin berkembang dan pada sisi yang lain juga MTs yang mengalami kemunduran karena tak mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan perubahan. Kelebihan dari madrasah sejak awal telah dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang mencetak moral,¹⁸ di lingkungan Kantor Kementerian Agama.

Kantor Kementerian Agama melalui bidang Mapenda berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas mutu madrasah khususnya MTs Negeri maupun MTs swasta, melalui tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan ditingkatkan kompetensinya dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah tenaga pendidiknya diberi beasiswa untuk belajar ke S2 di berbagai perguruan tinggi sesuai dengan jurusannya. Demikian juga Balai Diklat Keagamaan Bandung mempunyai tugas dan fungsinya adalah meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di MTs yang baik yang berstatus PNS maupun pegawai non PNS yang berada di lingkungan Kementerian Agama

¹⁵Zakiyah Daradjat, *Pengantar dalam Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), vii

¹⁶Zamakhsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta : LP3ES, 1994), 38-40.

¹⁷Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung : Mizan, 1998), 16.

¹⁸Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos, 1992), 12.

Propinsi Jawa Barat untuk didiklat sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan harapan setelah mereka didiklat akan meningkat kompetensinya, yang pada gilirannya akan menjadi guru profesional di bidangnya. Dengan demikian kondisi MTs menjadi lebih baik dan MTs menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya.

Kabupaten Bandung Barat, sebagai kabupaten yang masyarakatnya sejak lama memiliki nuansa religius sangat bagus, dibuktikan dengan banyaknya pondok-pondok pesantren, majlis ta'lim, dan MTs-MTs yang hampir ada di setiap kecamatan. Khusus untuk MTs kebanyakan swasta yang dikelola oleh yayasan milik pribadi atau milik lembaga organisasi kemasyarakatan. MTs yang Negeri di Kabupaten Bandung Barat hanya ada lima MTs Negeri, yaitu : MTs Negeri 1 Bandung Barat, MTs Negeri 2 Bandung Barat, MTs Negeri 3 Bandung Barat, MTs Negeri 4 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat.

Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian pada tiga MTs Negeri saja yang diteliti yaitu : MTs Negeri 1 Bandung Barat, MTs Negeri 2 Bandung Barat dan MTs Negeri 5 Bandung Barat. Dengan asumsi bahwa MTs Negeri 1 Bandung Barat merupakan MTs Negeri yang pertama berdiri di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian MTs Negeri 2 Bandung Barat merupakan MTs Negeri yang dianggap paling maju dibanding dengan empat MTs Negeri lainnya di Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan MTs Negeri 5 Bandung Barat merupakan MTs Negeri yang paling terakhir berdiri di Kabupaten Bandung Barat.

Gambaran keberadaan MTs-MTs tersebut hampir semuanya pamornya masih berada di bawah sekolah umum khususnya yang negeri sehingga bagi anak yang tidak lulus masuk ke sekolah umum kebanyakan memilih ke MTs Negeri sebagai pilihan keduanya dan sisanya ke sekolah lain. Namun demikian tidak sedikit MTs Negeri menjadi pilihan pertama oleh anak-anak dan orang tua khususnya bagi mereka yang ingin anaknya lebih memahami tentang keagamaan yang lebih baik. Oleh karena itu madrasah perlu mengembangkan visi dan misi dalam rangka membuat citra madrasah lebih baik.

Pengembangan visi dan misi diawali dengan mengimplementasikan SPMP sebagai sebuah panduan dalam meningkatkan mutu madrasah. Madrasah di

Kabupaten Bandung Barat berdasarkan permendiknas nomor 63 tahun 2009 seyogyanya melakukan evaluasi Diri Madrasah yang selanjutnya disingkat EDM atau berdasarkan Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dengan sebutan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat dengan SPMI melalui empat tingkatan acuan standar mutu, yaitu: tingkat pertama di bawah SPM, tingkat kedua SPM, tingkat ketiga SNP, dan tingkat keempat di atas SNP. Standar mutu diatas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP. Standar mutu diatas SNP yang berbasis keunggulan lokal dan Standar mutu diatas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.

Penjaminan mutu pendidikan yang harus tercapai oleh MTs di Kabupaten Bandung Barat adalah pemenuhan delapan SNP yaitu : Standar Isi, Standar Proses, Standar Kelulusan, Standar Pendidik Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian sesuai aturan yang berlaku.

Implementasi SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat mulai dilaksanakan tahun 2012 yang diawali dengan sosialisasi SPMP oleh Bidang Mapenda Kanwil Propinsi Jawa Barat dan Seksi Mapenda Kanmenag Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MK2-MTs) maupun di wilayah Kelompok Kerja Madrasah (KKM). Demikian juga Balai Diklat Keagamaan Bandung melalui diklat peningkatan kompetensi pengawas dan kepala madrasah yang di dalamnya mencakup materi SPMP yang selanjutnya pengawas melakukan monitoring dengan baik. Oleh karena itu menurut peneliti, bahwa dengan implementasi SPMP yang optimal, maka selayaknya peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat menjadi lebih baik.

Berdasarkan pengamatan awal implementasi SPMP yang dilakukan di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat kenyataan menunjukkan kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan pelaksanaan SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat belum dilaksanakan secara optimal.

2. Seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendukung terlaksananya SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat belum optimal.
3. Rekomendasi yang dihasilkan dari EDM yang mencakup delapan SNP dalam SPMP belum sepenuhnya diprogramkan dalam RKM dan belum dilaksanakan dengan sebaik-baunya.
4. Keterlibatan komite madrasah dan orang tua peserta didik belum maksimal.

Menurut dugaan peneliti, terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan dalam implementasi SPMP untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah di kabupaten Bandung Barat, antara lain :

1. Kesiapan pelaksanaan SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat terutama dalam pelaksanaan EDM yang mencakup delapan standar nasional yang menghasilkan rekomendasi yang seyogyanya dijadikan dasar dalam pembuatan RAPBM dan RKM, pada kenyataannya rekomendasi yang telah dibuat dalam EDM belum dilaksanakan dengan optimal dalam pembuatan RAPBM dan RKM.
2. Standarisasi SPMP terlalu ideal sehingga cukup sulit untuk dicapai.
3. Keterbatasan pembiayaan yang hanya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS/M) dalam pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan khususnya standar sarana dan prasarana karena madrasah tidak boleh memungut sumbangan pendidikan dari masyarakat khususnya orang tua peserta didik.
4. Peran serta *stake holder* belum maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu penelitian tentang **“SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH BERBASIS MANAJEMEN MUTU TERPADU** (Penelitian pada MTs Negeri di Kabupaten Bandung Barat).

B. Perumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peningkatan mutu madrasah melalui implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat?

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perencanaan program implementasi SPMP dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan program implementasi SPMP dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana pengawasan dan evaluasi program implementasi SPMP dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana kendala dan solusi implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat?
5. Bagaimana tingkat keberhasilan SPMP berbasis Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk :
 - a. Menganalisis perencanaan program implementasi SPMP dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat.
 - b. Menganalisis pelaksanaan program implementasi SPMP dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat.
 - c. Menganalisis pengawasan dan evaluasi program implementasi SPMP dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat.
 - d. Menganalisis kendala dan solusi implementasi SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan mutu di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat.
 - e. Menganalisis Tingkat Keberhasilan SPMP Berbasis Manajemen Mutu Terpadu dalam meningkatkan mutu di MTs Kabupaten Bandung Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan teoretis adalah sebagai berikut :
 - a. Dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan lebih lanjut
 - b. Dapat menjadi bahan dasar dan pertimbangan penelitian lebih lanjut.
 - c. Melengkapi teori mutu pendidikan.
2. Kegunaan praktis adalah sebagai berikut :
 - a. Dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan lebih lanjut dlam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan berkelanjutan.
 - b. Dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun program strategis dalam peningkatan mutu pendidikan Madrasah.
 - c. Dapat menjadi pertimbangan kepala Madrasah dan Pengawas dalam program pembinaan berkelanjutan.
 - d. Dapat menjadi pertimbangan sekaligus rekomendasi dalam pembuatan Rencana Kerja Madrasah pada setiap tahunnya.
 - e. Dapat menjadi bahan rujukan bagi para pihak yang berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan di lingkungan kementerian Agama.

D. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Roslawati 2011. *Sistem Informasi Manajemen Mutu Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Operasional Madrasah (Studi Terhadap Implementasi Permendiknas No. 19/2007, Khususnya Tentang Penyelenggaraan SIM Madrasah Di SMAN Kota Bandung)*, Disertasi pada program studi kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (tidak dipublikasikan), Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah: Penyelenggaraan SIM Madrasah di SMAN Kota Bandung), *Disertasi*, Bandung (tidak dipublikasikan).

Disertasi ini menjelaskan Sistem Informasi Manajemen Mutu Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Operasional Madrasah dalam rangka

mengimplementasikan Permendiknas No. 19/2007 tentang standar pengelolaan, khususnya tentang Penyelenggaraan SIM Madrasah Di MAN Kota Bandung.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menjelaskan bahwa, sistem informasi manajemen mutu dapat meningkatkan mutu layanan operasional madrasah, mulai dari pendataan siswa baru, pendataan siswa yang mendapatkan bantuan, pendataan siswa yang akan ikut ujian nasional. Tidak kalah pentingnya juga pendataan tenaga pendidik dan kependidikan. Data ini membantu pelaksanaan Tata Usaha dalam menginput data kepegawaian secara otomatis.

2. Karna Sobahi. 2009. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Analitik Kualitatif Pemberdayaan Komite Madrasah SMA/SMK Era Otonomi Daerah Oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Di Kabupaten Majalengka)*” (tidak dipublikasikan),. Disertasi pada program studi Manajemen Pendidikan di UNINUS. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah: Sejauh mana implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam peningkatan Mutu Pendidikan (Studi analitik Kualitatif pemberdayaan Komite Madrasah SMA/SMK Era Otonomi daerah oleh Pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Dewan Pendidikan di Kabupaten majalengka).

Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah diperlukan. Masyarakat yang terlibat dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan adalah masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam hal ini khususnya orang tua wali siswa dan komite sebagai perwakilan dari para orang tua siswa. Peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak boleh dipandang sebelah mata. Pendidikan yang tanggungjawabnya dibebankan kepada masyarakat, kepada sekolah dan kepada pemerintah akan menjadikan pendidikan yang berkualitas.

3. Elly Ganefi. 2010. *Implementasi Sistem Manajemen Mutu Terhadap Produktifitas SMK (Studi Analisis Kontribusi Implementasi SMM ISO 9001 : 2000, Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kinerja Guru, Dan Fasilitas Belajar Terhadap Produktifitas SMK Propinsi Jawa Barat) (Tidak Dipublikasikan),*, Disertasi pada program studi kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia

Bandung. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah : Sejauh mana Implementasi Sistem manajemen Mutu Terhadap Produktifitas SMK (Studi analisis kontribusi implementasi SMM ISO 9001 : 2000, Kepemimpinan kepala Madrasah, kinerja guru, dan fasilitas belajar terhadap produktifitas SMK propinsi Jawa Barat.

4. Tatang Sunendar Iskandar. 2012. *Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Studi tentang Pengaruh Kepemimpinan Pembelajaran, Suvervisi Akademik, Penilaian Kinerja, Perencanaan Strategis, Fokus pada Pelanggan, Pengembangan SDM dan Budaya Mutu terhadap Mutu Sekolah Standar Nasional di Propinsi Jawa Barat) (Tidak Dipublikasikan)*, Disertasi pada program studi kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara variabel yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses penjaminan mutu Sekolah Standar Nasional di Jawa Barat.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan antara variable yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung terhadap proses penjaminan mutu di sekolah Standar Nasional (SSN). Oleh karena itu Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Studi tentang Pengaruh Kepemimpinan Pembelajaran, Suvervisi Akademik, Penilaian Kinerja, Perencanaan Strategis, Fokus pada Pelanggan, Pengembangan SDM dan Budaya Mutu terhadap Mutu

5. Mohib Asrori. 2009. *Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Di MTsN Tunggangri Tulungagung)*.

Substansi yang dibahas adalah :

- a. kepemimpinan Kepala Madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan menggunakan strategi demokratis.
- b. Adapun upaya Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sana, yaitu:
 - 1) Kepala Sekolah (Melalui Waka Kurikulum) merombak struktur pembelajaran,

- 2) Kepala Sekolah memperbaiki manajemen pembelajaran secara total,
 - 3) Kepala Sekolah memberikan semangat dan kesadaran kepada seluruh elemen lembaga untuk menjunjung komitmen dan budaya mutu,
 - 4) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu madrasah.
- c. Kepemimpinan kepala Madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan menemui beberapa kendala antara lain adalah;
- 1) Rendahnya kesadaran para guru dan bawahan akan peningkatan mutu pendidikan, b) Minimnya keberadaan guru yang berkompeten,
 - 2) Di MTsN Tunggangri guru tetap mata pelajaran diidentifikasi kurang dan lebih naïf lagi belum tersedianya guru tetap mata pelajaran,
 - 3) Tenaga Tata Usaha juga masih sangat kurang.
- d. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di atas, maka Kepala Madrasah melakukan kiat-kiat sebagai berikut:
- 1) Untuk mengatasi permasalahan minimnya kesadaran guru dan bawahan akan peningkatan mutu pendidikan, Kepala Madrasah secara terus menerus melakukan komunikasi dan kampanye budaya mutu pendidikan,
 - 2) Dalam mengatasi kurangnya tenaga pengajar mata pelajaran tetap, madrasah mengajukan permohonan tenaga guru dan pegawai tata usaha melalui instansi terkait, terutama lewat Depag Daerah atau Pusat. MTsN Tunggangri juga mengangkat guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang berkelayakan untuk mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak,
 - 3) Dan untuk mengatasi kurangnya sarana prasarana maka MTsN berupaya mengajukan DPP kepada Pemerintah Pusat. MTsN juga

bekerjasama dengan Komite Madrasah untuk mengumpulkan infaq/shodaqoh/jariah dari wali murid.

6. Nunu Ahmad An-Nahidl. 2007. *Spektrum baru Pendidikan Madrasah. Penelitian yang dipublikasikan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Disertasi, Substansi yang dibahas mengenai kesiapan madrasah (MTsN) dalam pemenuhan Standar pengelolaan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang baru menunjukkan skor 64%. Hal tersebut merupakan hasil dari kesiapan dalam melakukan perencanaan program menunjukkan skor 3,4 atau 68%, melaksanakan rencana kerja memperoleh skor 3,3 atau 66%, sedangkan pengawasan dan evaluasi menunjukkan skor 2,9 atau 58% kesiapan dalam pemenuhan standar pengelolaan dalam SNP.

Hal-hal yang menyebabkan kurangnya kesiapan madrasah dalam memenuhi standar pengelolaan dalam SNP di antaranya kurangnya pembinaan dari pemerintah (Kemenag), karena masih belum diotonomikan, sedangkan sekolah umum yang diotonomikan lebih terkelola. Misalnya dalam masalah pendanaan dan pembinaan lainnya. Selain hal tersebut, masalah SDM juga menjadi factor yang menyebabkan madrasah belum siap memenuhi standar pengelolaan dalam SNP.

Dari beberapa hasil penelitian yang berupa disertasi sebelumnya itu menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu diantaranya, menjelaskan tentang sistem informasi manajemen mutu madrasah yang selama ini perhatiannya sangat minim di banding dengan lembaga pendidikan-pendidikan di sekolah umum. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan tentang kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, Beberapa kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, manajemen penjaminan mutu pendidikan sekolah, manajemen mutu berkelanjutan, kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, spektrum baru pendidikan madrasah. Memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang ini dapat dikatakan penelitian yang relatif baru, baik dari segi substansi, teori, maupun metodologi keilmuannya.

F. Kerangka Pemikiran

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.¹⁹ Sedangkan menurut Slamet Margono bahwa, pejaminan mutu bertujuan untuk pencegahan kesalahan (*prevention*). Karena itu, dalam proses pengadaan produk diusahakan agar setiap langkah dilaksanakan dengan cermat sejak permulaan dan terus diawasi selama pemrosesan. Prinsip “pencegahan” lebih baik dari “perbaikan” dipegang teguh, apabila ada kesalahan pada waktu pemrosesan itu juga dilakukan perbaikannya.

Dalam sistem penjaminan mutu, ada tiga fokus yang menjadi perhatian utama dalam manajemen pendidikan, yaitu : Pertama, Memahami kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya. Kedua, menerjemahkan kebutuhan pelanggan itu ke dalam perencanaan. Ketiga, Pemrosesan untuk menghasilkan produk yang bermutu. Kemudian memadukan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dalam usaha peningkatan mutu terus-menerus, yang mengimplikasikan keharusan memberdayakan seluruh SDM organisasi dan adanya kepemimpinan yang andal (*visioner, pemersatu, pemberdaya, terbuka dan delegatif*).²⁰

Dalam bidang pendidikan perubahan untuk penjaminan mutu harus dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip dasar utama, yaitu:

Filosofi, Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dipandang sebagai lembaga produksi yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh para konsumennya. Mutu jasa yang dihasilkan ditentukan oleh sejauhmana dia memenuhi atau melebihi kebutuhan konsumen, baik konsumen internal maupun eksternal. Agar jasa yang dihasilkan itu secara terus menerus disesuaikan dengan konsumen, maka feedback dari konsumen sangat penting untuk dijadikan dasar dalam menentukan derajat mutu yang harus dicapai. *Tujuan*, Tujuan lembaga pendidikan adalah memproduksi jasa yang didistribusikan kepada semua konsumen baik internal (*guru dan karyawan*), dan eksternal (khususnya primer

¹⁹ Kementerian Pendidikan Nasional. *Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Permadrasah Bidang Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Ditjen Dikdasmen-Depdiknas, 2003), 72

²⁰ Slamet Margono, *Quality Assurance Pendidikan*, (Lampung : IKIP UNILA, 2010), 15

yaitu peserta didik). Setiap aktivitas yang menjadi jasa yang diproduksi harus diberikan dalam tingkatan mutu yang lebih tinggi. Proses, Proses pendidikan, harus mempedulikan kesesuaian dengan konsumen eksternal. *Feedback* dari konsumen eksternal ini harus menjadi dasar dalam menentukan derajat mutu jasa yang diproduksi.

Untuk mencapai derajat mutu yang diinginkan itu lembaga pendidikan hanya menggunakan sumber daya manusia yang terdidik yang baik dengan sistem dan pengembangan produksi jasa yang memiliki nilai tambah yang memungkinkan konsumen memperoleh kepuasan yang tinggi.²¹

Dalam menerapkan penjaminan mutu diperlukan pembakuan mutu dan standar mutu. Dalam bidang industri manufaktur maupun jasa termasuk pendidikan, dewasa ini pembakuan mutu telah dilakukan internasional pembakuan mutu, yang pada mulanya bernama *quality system* yang dikeluarkan oleh *Brithish Standart 5750* atau *BS 5750*, yang terutama digunakan departemen pertahanan Inggris dan NATO dengan AQAP (*Allied Quality Assurance Procedures*).²²

Kaitanya dengan penjaminan mutu pendidikan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang SPMP di Indonesia dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional mencakup: a) Keimanan, ketakwaan,- akhlak, budi pekerti dan kepribadian, b) Kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestetik, vokasional serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi dan minat masing-masing, c) Muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan d) Kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan, e) Tingkat kemandirian serta daya saing, dan f) Kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya.

Peningkatan mutu pada madrasah sesuai dengan SNP yang telah ditetapkan, namun pengukuran mutu lebih terfokus kepada mutu pendidikan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu pembelajaran, perilaku dan budaya madrasah. Selain itu mutu madrasah juga akan dilihat secara eksternal (akreditasi)

²¹ Herman dan Herman “*Total Quality Management (TQM) for Education*”, Journal of Education Technology, May-june (p.14-18) (1995) dalam Udin “*Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) dalam Rangka sukses UAN di Madrasah*” (2004), 6

²² Herman dan Herman, “*Total Quality Management (TQM) for Education*”, 7

dan internal (sesuai perencanaan program madrasah tersebut di antaranya berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah tersebut). Capai-capain standar yang telah ditetapkan diantaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Komitmen atau kepedulian semua pihak terutama pemerintah terhadap mutu pendidikan sangat tinggi dapat dilihat dari berbagai upaya dan proyek-proyek peningkatan mutu salah satunya dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 15 tahun 2010 tentang SPM di Kabupaten/Kota dan Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010.

Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2013 pasal 6 dijelaskan bahwa, SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota. (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan. (3) target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada akhir tahun 2014²³.

Uraian indikator yang tercantum di dalam SPM ini memiliki relevansi dengan indikator-indikator variabel mutu yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga hal ini memungkinkan untuk diteliti dengan fokus penelitian pengecualian pada hasil (*output*). Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terpadu antara penyelenggara dan pembina pendidikan di semua tingkatan dengan satuan/program pendidikan dalam kerangka SPMP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 tentang SPMP.²⁴ Sebelum penetapan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan perlu memahami dulu apa

²³ Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota

²⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, *Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Jakarta : 2009)

yang dimaksud dengan mutu pendidikan, penjaminan mutu pendidikan, SPMP, SPM dan SNP.

Dalam pelaksanaannya sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah diperlukan kepemimpinan kepala madrasah yang berkualitas yang memahami kebutuhan *stakeholder* dengan sebaik-baiknya dan dapat menerjemahkan kebutuhan *stakeholder* itu ke dalam perencanaan, proses dan pelaksanaan untuk menghasilkan produk yang bermutu. Kemudian memadukan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dalam usaha peningkatan mutu terus-menerus, yang berdampak pada seluruh SDM organisasi yang ada dapat diberdayakan dengan adanya kepemimpinan yang andal, yaitu kepemimpinan yang visioner, pemersatu, pemberdaya, terbuka dan delegatif.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di madrasah menuntut ketercapaian standar-standar yang telah ditentukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal yaitu melalui EDM sedangkan evaluasi eksternal melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Adapun standar-standar yang harus dicapai adalah di bawah SPM, SPM, SNP dan standar di atas SNP. Dalam pelaksanaana EDM pengisian instrument EDM dikonfirmasi dengan indikator kunci yang telah tersedia.

EDM dilakukan setiap tahun sekali oleh satuan pendidikan yang pelaksanaan EDM dimonitoring oleh tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan sesuai kebutuhan dengan tahapan-tahapan adalah: *pertama*, pengisian instrumen EDM yang dikonfirmasi dengan indikator kunci. Kemudian menyusun rekomendasi dalam delapan standar nasional pendidikan yang ada. Rekomendasi tersebut sebagai dasar dalam penyusunan RKM dan RKT. *Kedua*, selanjutnya seluruh instrument yang telah diisi dan lengkap dengan rekomendasinya dikumpulkan sebagai data Emis dan diagregasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat yang langsung dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi. Hasil dari EDM ini sebagai persiapan akreditasi Madrasah yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Implementasi SPMP terlebih dahulu melalui EDM sebagai evaluasi internal yang dilakukan setiap tahun dengan tahapan-tahapan sebagaimana

tersebut di atas. Kemudian setiap empat tahun sekali dilakukan evaluasi eksternal yaitu dengan akreditasi dengan hasil terakreditasi BAN/S-M dengan nilai terakreditasi A, B, C, dan tidak terakreditasi. Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, bahwa dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan melalui EDM diharapkan dapat meningkatkan mutu MTs Negeri di Kabupaten khususnya kabupaten Bandung Barat.

Dari proses kegiatan SPMP khususnya dalam EDM yang berjalan di MTsN Kabupaten Bandung Barat kiranya perlu ditingkatkan lagi, karena pada dasarnya EDM yang dilakukan setiap tahun ini menjadi titik awal capaian standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu madrasah yang berlangsung secara internal yaitu melalui penilaian diri satuan pendidikan atau evaluasi diri sekolah/madrasah. Khusus untuk di madrasah nomenklaturanya yaitu Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Dalam EDM ini terdapat instrument delapan standar nasional pendidikan yang harus dicapai oleh madrasah sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai level-level yang telah ditentukan ada pada instrumen EDM yaitu level 1 dibawah SPM, level 2 mencapai SPM, level 3 mencapai SNP dan level 4 diatas SNP dengan indikator yang bersifat kualitatif.

Setelah dilakukan evaluasi diri yang dilakukan pada setiap tahunnya, maka selanjutnya dilakukan penilaian secara eksternal dengan melalui akreditasi sekolah/madrasah setiap empat sampai lima tahun sekali yang dilakukan oleh BAP-BAN S/M dengan indikator akreditasi yang bersifat kuantitatif dengan hasil terakreditasi A,B,C dan tidak terakreditasi.

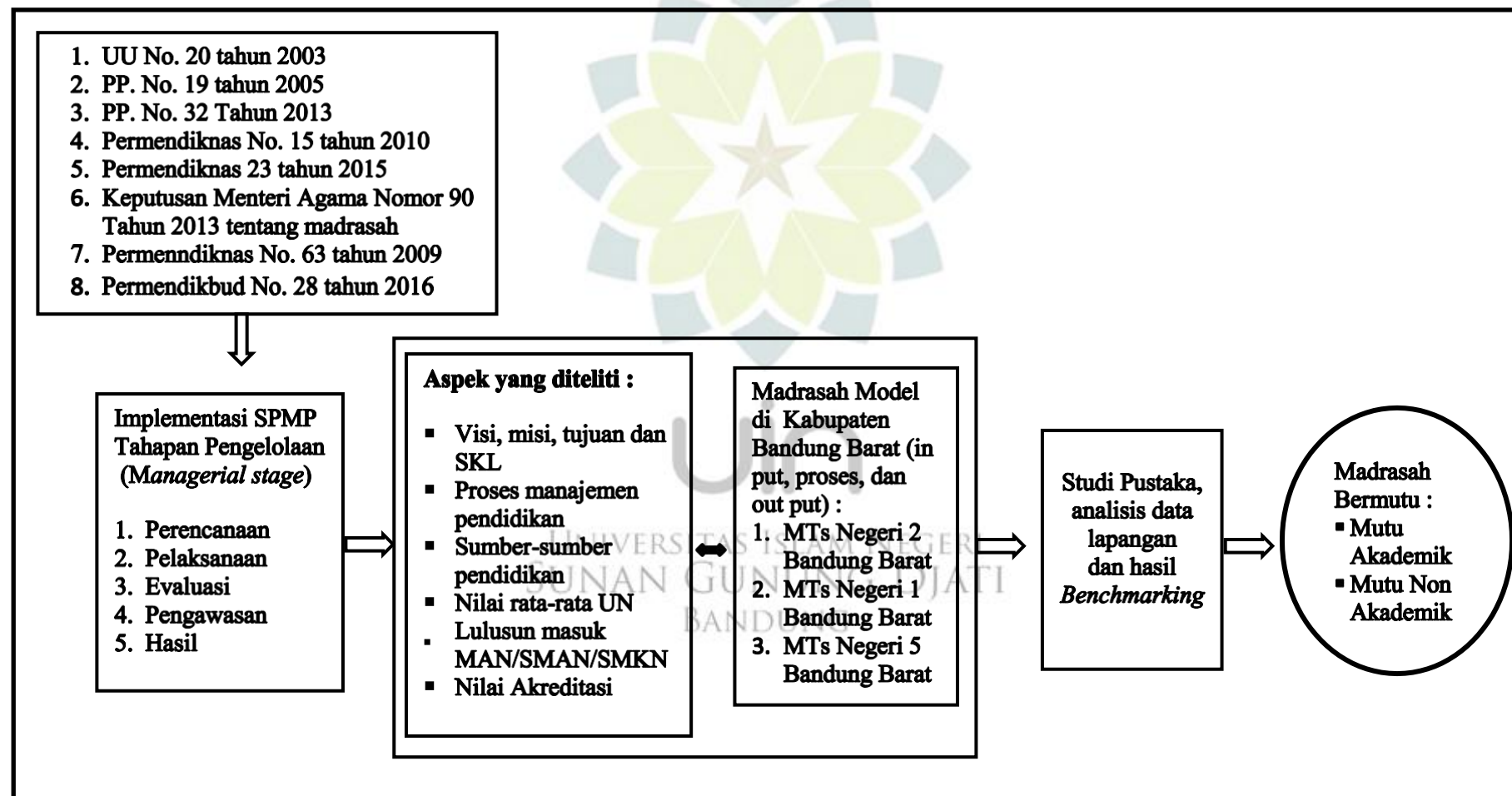
Akan tetapi nampaknya kegiatan EDM di MTsN di Kabupaten Bandung Barat belum maksimal sehingga perlu strategi yang tepat, dimulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi untuk menuju penjaminan mutu madrasah yang lebih baik. Adapun strategi yang ditawarkan oleh penulis yaitu sosialisasi pengisian instrument EDM, pendampingan langsung, Kegiatan IHT, KKG/MGMP dan Diklat. Dengan demikian akan terpantau progres yang telah dilakukan oleh madrasah dalam pencapaian level-level standar yang ada pada instrument EDM tersebut baik di bawah SPM, SPM, SNP dan di atas SNP.

Dari dasar pemikiran di atas penulis ingin menganalisis implementasi SPMP di MTs Negeri Kabupaten Bandung Barat dalam peningkatan mutu pendidikan baik peningkatan mutu akademik maupun peningkatan mutu non akademik.

Untuk memperjelas skema kerangka berpikir di atas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Secara substansi penelitian ini menggunakan beberapa teori, untuk teori induk utama atau *Grand Theory* dipergunakan *Total Quality Manajement* (Manajemen Mutu Terpadu) kemudian pada tataran teori antara atau *Midle Range Theory* dipergunakan Model Penjaminan Mutu Pendidikan dan pada tataran teori terapan atau *Applied Theory* dipergunakan teori *Pland Do Ceck Action*.

